

# **HAK PRESIDEN RI MEMBERIKAN ABOLISI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

**MERY HARTANTO**

NPM : 1421020092

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**2018 M/1439 H**

# **HAK PRESIDEN RI MEMBERIKAN ABOLISI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

**MERY HARTANTO**

NPM : 1421020092

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**2018 M/1439 H**

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (*library research*) tentang Hak Presiden RI Memberikan abolisi Dalam Perspektif Siyasah. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang), hak yang dimaksud adalah hak presiden sebagai kepala negara. Sedangkan abloisi adalah sebuah keputusan untuk menghentikan pemeriksaan, pengusutan dan penelitian sebuah kasus atau perkara yang relatif besar, saat pihak pengadilan belum menjatuhkan atau memutuskan atau mengetuk palu atas perkara tersebut, dimana penghentian pemeriksaan tersebut diberikan dengan alasan umum karena perkara tersebut berkaitan dengan kepentingan dan urusan Negara yang tidak mempunyai kelayakan untuk dikorbankan oleh keputusan pengadilan. Dasar hukum abolisi adalah UUD 1945 pasal 14 ayat 2 dan Keppres Nomor 22 tahun 2005, Presiden mempunyai hak memberikan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan berdasarkan kepentingan umum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apa dasar hukum dan yang menjadi pertimbangan hukum bagi Presiden dalam memberikan abolisi dan Bagaimana perspektif *Siyasah Dusturriyah* terhadap abolisi. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang apa itu abolisi, dasar hukum dan apa pertimbangan Presiden dalam memberikan abolisi dan untuk mengetahui bagaimana *Siyasah Dusturriyah* memandang hal tersebut (tentang abolisi)

Data penelitian diperoleh dari buku-buku, artikel dan undang-undang refrensi yang ada korelasi dengan judul penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif, dimulai dengan hal-hal yang bersifat umum kemudian bersifat khusus, yaitu tentang hak presiden mengeluarkan abolisi kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum kaitanya dengan analisis siyasah dusturriyah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pandangan dalam siyasah dusturriyah abolisi sangat mengedepankan kepentingan rakyat atau umat suatu negara, sehingga dengan adanya hak untuk mngeluarkan abolisi tersebut membuat pertahanan suatu negara atau keamanan bisa terjaga dari hal-hal yang tidak di inginkan tersebut karena sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Lampung*

ns.s

**PERSETUJUAN**

Nama : Mery Hartanto  
NPM : 1421020092  
Prodi : Siyasah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Hak Presiden RI Memberikan Abolisi Dala  
Perspektif Siyasah Dusturriyah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 3 Juli 2018

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**

**Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

**NIP. 195802011986021002**

**NIP. 197512302003121002**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Siyasah**

**Drs. Susiadi AS., M.Sos.I**

**NIP. 196908081993032002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Sekretariat : Jl, Letkol. H. Endero Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Lampung*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"HAK PRESIDEN RI MEMBERIKAN ABOLISI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH"** disusun oleh Mery Hartanto, NPM 1421020092, Program Study : Siyasa Syar'iyah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa , 3 Juli 2018.**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Dr. Liky Faizal. S.Sos., M.H**

(.....)

**Sekretaris : Dr. Agus Hermanto., M.H.I**

(.....)

**Penguji I : Dr. Iskandar Syukur., M.A**

(.....)

**Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**

(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

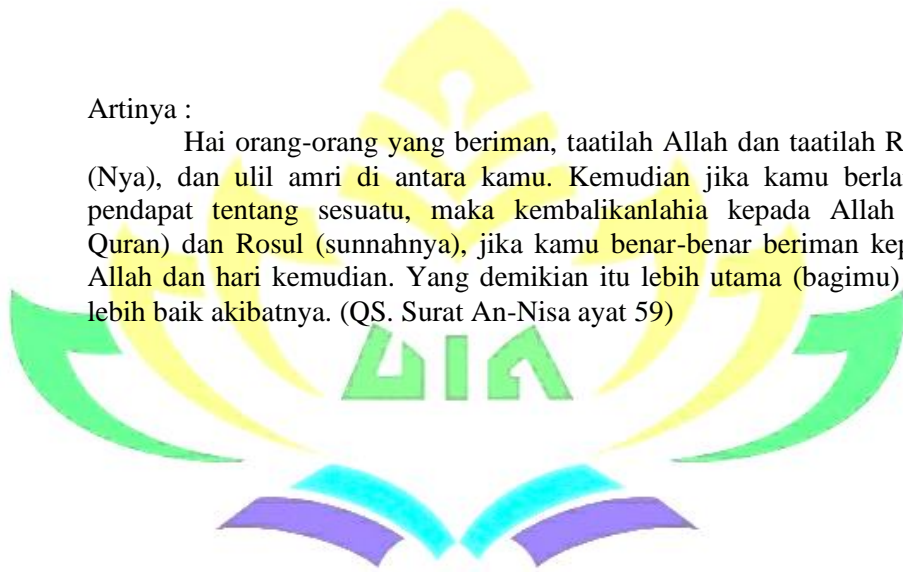
يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ

تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Surat An-Nisa ayat 59)





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil' alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya. Kupersembahkan Skripsi ini Kepada Orang-Orang Yang Tercinta dan tersayang, diantaranya:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Bak ku (Anwar) dan Mak ku (Nurhuda) yang doanya tak pernah putus, kasih sayang yang tak pernah pudar, motivasinya yang tak pernah padam sehingga semua mengiringiku dalam menuju kesuksesan.
2. Adik-adikku tersayang, Tri Ayuda Sari, Adi Handoko,
3. Kakak tersayang Evri Santi S.Kom. dan keluarga besarku yang selalu mendorong untuk terus tetap semangat.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung.
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Siyasah angkatan 2014, Robert Nando. S.H, Hendriyansyah. S.H, Slamet Wiyanto. S.H, Hendri Setiawan. S.H, Andi Herdiana S.H, Windu Fitria. S.H, Darmawan. S.H, Yana Puspita. S.H, Lisa Oktavia. SH, Reka Marsela .S.H, Risti Yuli S.H, Ardi Langga. S.H, Meila Iskatrilia S.H, Nabila Puspita. S.H, Ridho Pratama S.H, Dedi Suwardi. S.H, Haris Samarga S.H, Iwan Riadi, S.H, Arif Hidayat S.H, Vera Agus. S.H, Heri Irawan. S.H, Anjar Kurniawan. S.H.
6. Dan terimakasih juga untuk Fitri Rendana S.Pd yang aku sayangi yang menjadikan motivasiku untuk selalu menuju kesuksesan.
7. Teman-teman KKN Kelompok 152 desa Padan,

8. Rekan-rekan driver Go-jek Takis dan Gedong Meneng yang telah mengajarkan kemandirian, kepedulian dan solidaritas, Salam satu aspal.
9. Saudara-saudara ku di PERDAPENA (Persatuan Pemuda Pelajar Ngambur)
10. Sahabat-sahabat PMII khususnya Rayon Syariah



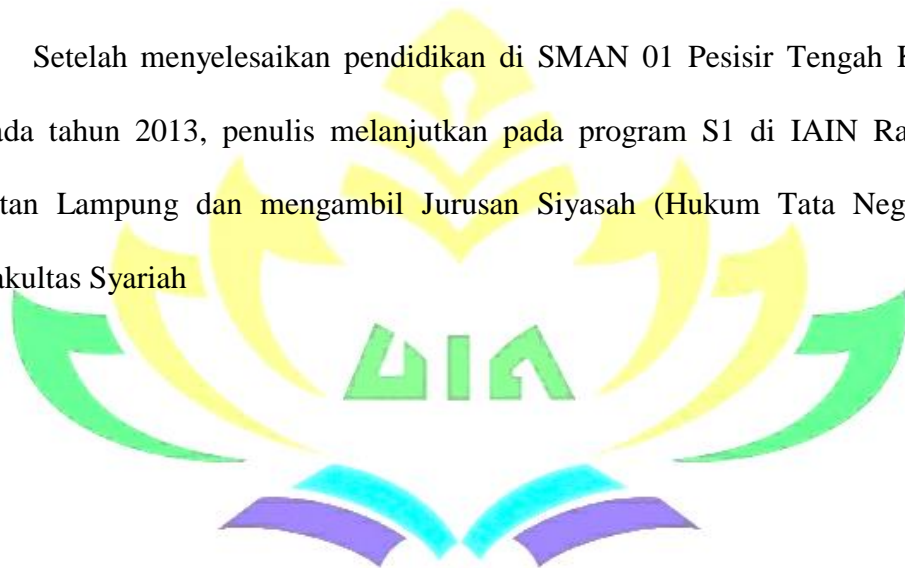


## **RIWAYAT HIDUP**

**MERY HARTANTO** dilahirkan di Gedung Cahya Kuningan pada tanggal 12 Mei 1995, yang merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Anwar dan Ibu Nurhuda

Sebelum masuk kejenjang perguruan tinggi, penulis menempuh pendidikan tingkat dasar di SDN 01 Gedung Cahya Kuningan, kemudian masuk kejenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 02 Pesisir Tengah Krui, kemudian masuk kejenjang pendidikan menengah atas di SMAN 01 Pesisir Tengah Krui.

Setelah menyelesaikan pendidikan di SMAN 01 Pesisir Tengah Krui pada tahun 2013, penulis melanjutkan pada program S1 di IAIN Raden Intan Lampung dan mengambil Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayahNya serta petunjuk dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **HAK PRESIDEN RI MEMBERIKAN ABOLISI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH**, Shalawat beriring salam kami semoga tersampaikan kepada Nabi Allah yang mulia yakni Rosulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan study pada program Stara Satu (S1) Jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum(SH). Dalam bidang ilmu Syari'ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi bantuan pemikiran, dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof.Dr.H.Moh.Mukri,M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr.Alamsyah,S.Ag.,M.,Ag serta para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Ketua Jurusan Siyasah Bapak Drs Susiadi AS.,M. Sos.i dan sekretaris jurusan Siyasah Bapak Frenki M.Si.

4. Pembimbing I Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. dan Pembimbing II Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta para Staf Karyawan Fakultas Syariah.
6. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, refrensi dan lain-lain.
7. Bapak dan Ibu guruku dari SD, SMP, dan sampai SMA terimakasih atas ilmunya dan pengalaman yang kalian berikan.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiqnya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lam.

Bandar Lampung, 3 Juli 2018

Penulis

Mery Hartanto

NPM. 1421020092



## DAFTAR ISI

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>JUDUL .....</b>         | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>       | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN.....</b>    | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>    | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>         | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>    | <b>vi</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b> | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b> | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>     | <b>x</b>    |

### BAB I PENDAHULUAN

|  |   |
|--|---|
| A. Penegasan Judul .....               | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul .....          | 2 |
| C. Latar belakang Masalah .....        | 2 |
| D. Rumusan Masalah .....               | 5 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 6 |
| F. Metode Penelitian .....             | 6 |

### BAB II LANDASAN TEORI

|   |    |
|---|----|
| A. Pengertian dan Macam Siyasah .....   | 12 |
| B. Kewenangan Penguasa (Khalifah/Presiden) Terkait Kepentingan Umum Menurut Siyasah ..... | 36 |
| C. Pertimbangan Hukum Dalam Pemberian Pengampunan Hukuman Menurut Islam (Siyasah).....    | 40 |

### **BAB III HAK PRESIDEN RI DALAM MEMBERIKAN ABOLISI**

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian dan Latar Belakang Lahirnya Abolisi di Indonesia ..... | 51 |
| B. Pertimbangan Hukum dan Tujuan Pemberian Abolisi .....             | 58 |
| C. Hak-hak Presiden .....  | 64 |
| D. Contoh Kasus Pemberian Abolisi .....                              | 68 |

### **BAB IV ANALISA DATA**

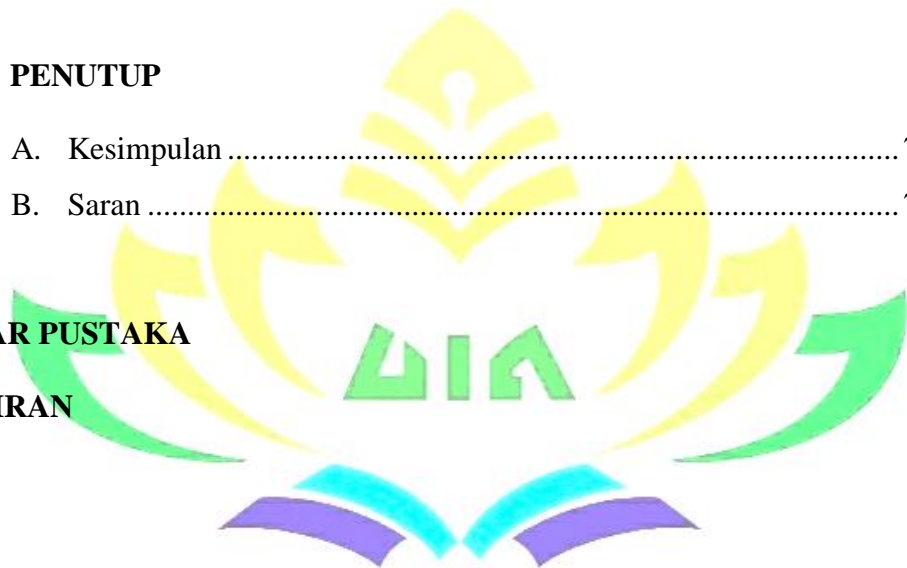
|   |    |
|---|----|
| A. Pertimbangan-pertimbangan Hukum Presiden Dalam Memberikan Abolisi..... | 71 |
| B. Abolisi Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.....                       | 73 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 74 |
| B. Saran .....      | 75 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi “Hak dan Kewenangan Presiden RI Dalam Memberikan Abolisi Perspektif Siyasah”, yaitu sebagai berikut:

Hak : Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang), hak yang di maksud disini adalah hak Presiden sebagai kepala Negara<sup>1</sup>

Abolisi :Penghapusan perbudakan, pembatalan tuntutan pidana, “ hak abolisi adalah hak prerogatif Presiden RI untuk menghapuskan suatu tuntutan pidana atau menggugurkan suatu tuntutan pidana yang sedang dilakukan.”<sup>2</sup>

*Siyasah*: Salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>3</sup>*Siyasah* yang dimaksud dalam judul ini adalah *Siyasah Dusturiyah* yaitu Bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah Perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara

---

<sup>1</sup>Drs. Sudarsono, S.H., M.Si., Kamus Hukum, Cet V, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, 7

<sup>2</sup>Ibid hlm 13

<sup>3</sup>Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., Fiqh Siyasah Cet ke-1. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014



perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut <sup>4</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Secara Objektif**

- a. Presiden selaku kepala Negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab penuh terwujudnya kehidupan bangsa yang tentram, damai, nyaman dan aman, oleh karenanya Presiden memiliki hak memberikan abolisi atas warganya yang terkena kasus hukum dengan pertimbangan-pertimbangan hukum itu sendiri.
- b. Mengingat pentingnya Hak dan Kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi di Indonesia sehingga membuat penulis tertarik untuk dikaji ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.

### **2. Secara subyektif**

- a. Judul Skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari dibangku kuliah jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Negara hukum merupakan refleksi dari keinginan masyarakat secara utuh menundukkan dirinya terhadap suatu aturan yang akan mengikat dan berlaku tanpa kecuali kepada setiap anggotanya.<sup>5</sup> Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtssaar*), bukan Negara kekuasaan (*maachtssaar*). Dalam paham Negara hukum, hukumlah yang

---

<sup>4</sup> Prof. H.A Djazuli *Fiqh Siyasah* Cet III, Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, hlm 47

<sup>5</sup> BackyKrisnayuda, *Pancasiladan Undang-Undang*, Cet I, PT.Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 21

memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan Negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan dijalankan oleh hukum. <sup>6</sup>*The rule of law* dalam arti materiil bertujuan untuk melindungi warga masyarakat terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa sehingga memungkinkan manusia untuk mendapatkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, inti dari *the rule of law* dalam arti materiil adalah adanya jaminan bagi warga masyarakat untuk memperoleh keadilan sosial, yaitu suatu keadaan yang dirasakan oleh warga masyarakat penghargaan yang wajar dari golongan lain; sedangkan setiap golongan tidak merasa dirugikan oleh kegiatan golongan lainnya <sup>7</sup>

Negara Indonesia adalah negara Hukum <sup>8</sup> Suatu negara yang menganut sistem pemerintahan berdasarkan hukum, maka hukumlah yang mempunyai supremasi hukum sehingga dalam setiap gerak tindakan pola penguasa serta warga negaranya, baik secara individu maupun secara bersama harus mendapatkan legalisasi hukum. Karena prinsip legalisasi hukum ini adalah merupakan syarat yang hakiki untuk adanya tertib hukum dalam negara. Sehingga secara otomatis dalam negara hukum seperti Indonesia, legalitas harus benar-benar ada dalam setiap tindakan dari alat perlengkapan Negara.

---

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm 25

<sup>7</sup>Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Filsafat Hukum* Cet V, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 81

<sup>8</sup>Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet ke-14, Jakarta, 2015, hlm 116

Negara Indonesia kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di tangan Presiden, Presiden juga sebagai badan kekuasaan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan Presiden.<sup>9</sup>

Adapun hak dan kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi seperti tercantum dalam peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat 2 : Presiden memberi amnesti dan bolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat <sup>10</sup>
2. Undang-undang nomor 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 19 : Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan<sup>11</sup>
3. Undang-undang darurat nomor 11 Tahun 1954 Pasal 1 : Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi setelah mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah

---

<sup>9</sup>BachsanMustofa. S.H, *SistemHukum Indonesia*, Cet I, RemajaKarya, Bandung, 1984 hlm 7

<sup>10</sup>SekretariatJenderal MPR RI, *Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet ke-14, Jakarta, 2015, hlm 8

<sup>11</sup><https://m.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c3d72eb4a914/parent/2279>.  
diunduh tanggal 24 April 2018 pukul 8.53 WIB



Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan menteri kehakiman<sup>12</sup>

Menurut penjelasan UUD NRI 1945 kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal tersebut ialah merupakan konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

Contohnya pada kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM), setiap orang yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka diberikan abolisi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang dituangkan dalam Keppres Nomor 22 Tahun 2005 tentang pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri dan mencakup kepada semua anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Baik yang belum menyerahkan diri kepada yang berwajib hingga yang sedang atau telah selesai menjalani hukuman. Selanjutnya, hak sosial, politik, ekonomi dan hak-hak lainnya dari anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dipulihkan.<sup>13</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Agar lebih praktis dan mudah memahami, maka dari uraian dan pengertian pada latar belakang diatas, penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

---

<sup>12</sup><http://jdih.jabarprov.go.id/home/downloadfile/3761/1954/UndangUndang%20Tahun%201954%20Nomor%2011%20tentang%20Amnesti%20Abolisi.pdf> Diunduh tanggal 21 April 2018 pukul 8.28 WIB

<sup>13</sup>[https://m.detik.com/news/berita/d-432357/pemerintah-terbitkan-keppres-amnesti-abolisi bagi-gam](https://m.detik.com/news/berita/d-432357/pemerintah-terbitkan-keppres-amnesti-abolisi-bagi-gam). Diunduh pada 2 April 2018 pkl 09:23

1. Apa dasar hukum dan apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi Presiden dalam memberikan abolisi ?
2. Bagaimana perspektif *Siyasah Dusturriyah* terhadap abolisi ?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mendiskripsikan tentang apa itu abolisi, dasar hukum dan apa pertimbangan Presiden dalam memberikan abolisi ?
- b. Untuk mengetahui bagaimana *Siyasah Dusturriyah* memandang hal tersebut (tentang abolisi)

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan terutama dalam masalah hukum tentang Hak dan kewenangan Presiden dalam hal abolisi.
- b. Sebagai sumbangan wawasan bagi pembaca secara umum berkenaan dengan abolisi dalam perspektif siyasah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian

untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. <sup>14</sup>Dalam membahas penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan.<sup>15</sup> Data diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan pembahasan skripsi ini dan literature lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan dikaji.

b. Sifat penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Metode Deskriptif Analisis adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Pada umumnya tujuan utama penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.<sup>16</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan metode yuridis normative, yaitu pendekatan yang didasari pada Al-Qur'an, Hadist, peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

### 2. Data dan Sumber Data

---

<sup>14</sup>Joko Suvbagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1994), h. 2

<sup>15</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. IV, (Bandung: Maju Mundur, 1990), h. 33

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm 36



Data adalah koleksi data-data atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>17</sup>

Data ini termasuk data sekunder, karena sumber data pada penelitian perpustakaan pada umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama dilapangan. Yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang bersumber pada buku-buku pokok, Al-Qur'an, Hadist.
- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yang bersumber pada kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan, yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang terdapat di ruangan perpustakaan. Dengan kata lain teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data yang bersumber dari data primer ( Al-Qur'an, Hadist), sekunder (buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini), maupun tersier (kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini). Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan kajian

---

<sup>17</sup>Suharsimi Ariatunkumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114

dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul kemudian membuat ringkasan sementara.

#### 4. Pengelolah Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian diatas tersebut diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen yang relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas, dan tampak kesalahan.
- b. Sistem data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif dan deduktif. Metode berfikir induktif yaitu mempelajari peristiwa-peristiwa yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Sedangkan berfikir deduktif yaitu menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004, h. 127

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian dan Macam Siyasah

##### 1. Pengertian Siyasah

Kata siyasah berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al-'Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. *Abdul Wahhab Khallaf* mengutip ungkapan *Al-Maqrizi* menyatakan, arti kata *siyasah* adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasah* sama dengan *policy (of government, corprotion, etc)*. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Artinya siyasah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis dalam *Lisan al-'Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau pemimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.

Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudataran.

*Ibn al-Qayim* yang dinukilnya dari *Ibn' Aqil* menyatakan: Siyasah juga suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rosul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Dan siyasah adalah “pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara’<sup>19</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudataran yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

## **2. Macam-macam Siyasah**

Macam-macam Fiqh Siyasah Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli lain.

---

<sup>1919</sup>Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta, Raja Wali Pers, 1993), halm. 22-25



a. Menurut *Hasbi Ash Siddieqy*, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu;

- 1) *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah* adalah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* adalah sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah negara yang berdasarkan syariat.
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* adalah peraturan keadilan yang ditetapkan menurut syariat.
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah* adalah peraturan administrasi yang sesuai dengan syariat.
- 6) *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah* bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing.
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* peraturan tentang pelaksanaana di suatu negara tersebut.

8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.

Contoh lain dari pembedangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syari'ah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam empat bidang, yaitu:

- 1) *Fiqh Dustury*
- 2) *Fiqh Dawly*
- 3) *Fiqh Maliy*
- 4) *Fiqh Harbiy*

Pembedangan-pembedangan di atas tidak selamanya dipandang sebagai “pembedangan yang telah selesai”. Pembedangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Dalam fiqh tersebut, berkenaan dengan pola hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan:

- 1) *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi, permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat

luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Contoh Negara yang menganut siyasah dusturiyyah yaitu Negara Indonesia, *Ira'* dan lain-lain. Misalnya: Membayar pajak tepat waktu, pembuatan identitas kewarga negaraan seperti pembuatan KTP, SIM, dan AKTA Kelahiran.

- 2) *Fiqh siyasah dawliyyah, Dauliyah* bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan *Siyasah Dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurus masalah kaum *Dzimi*, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum *Dzimi*, hudud, dan qishash. *Fiqh* yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Contoh Negara yang menganut *siyasah dauliyah* yaitu Negara Iran, Malaysia, dan Pakistan. Meskipun tidak sepenuhnya penduduknya beragama Islam. misalnya. Misalnya: NATO PBB.

- 3) *Fiqh siyasah maliyyah*, *fiqh* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Maka, dalam *fiqh siyasah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam suatu kalangan rakyat, ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan miskin. *Fiqh siyasah* ini, membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar. Adapun Negara yang menganut *fiqh maliyyah* adalah Semua Negara. Contohnya: RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Negara).
- 4) *Fiqh Siyasah Harbiyyah*, yang mengatur tentang peperangan dan aspek –aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian. *Fiqh siyasah Harbiyyah* ini meliputi pengertian dari *fiqh harbiyyah* itu sendiri serta tujuan dan macam-macam peperangan dalam islam, kaidah-kaidah peperangan dalam islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminana keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan melalui perdamaian.<sup>20</sup>

#### b. Obyek Dan Metode Pembahasan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran*, halm. 39-41



Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan *T.M. Hasbi Ash Shiddieqy*: “Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu *nash* dari *nash-nash* yang merupakan *syariah ‘amah* yang tetap”. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan *Abul Wahhab Khallaf*: “Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”. Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh Siyasah* tidak berbeda dengan

metode yang digunakan dalam membahas Fiqh lain, dalam *Fiqh Siyasah* juga menggunakan *Ilm Ushul Fiqh* dan *Qowaid fiqh*.

Secara umum, lingkup yang digunakan adalah:

#### 1) *Al-Ijma'*

*Al-Ijma'* merupakan kesepakatan (konsensus) para *fuqaha* (ahli fiqh) dalam satu kasus. Misalnya pada masa khalifah *Umar ra*. Dalam mengatur pemerintahannya *Umar ra* melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana-perdata, menggaji tentara, administrasi negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu. Bahkan *Umar ra* mengintruksikan untuk shalat tarawih jama'ah 20 raka'at di masjid, merupakan keberaniannya yang tidak diprotes oleh sahabat lain. Hal ini dapat disebut *ijma' sukuti*.

#### 2) *Al-Qiyas*

Dalam *fiqh siyasah*, *qiyas* digunakan untuk mencari umum *al-ma'na* atau ilat hukum. Dengan *qiyas*, masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan tempat berbeda jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama.

#### 3) *Al-Mashlahah al-Mursalah*

*Al-mashlahah* artinya mencari kepentingan hidup manusia dan *mursalah* adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan *nash* Al-Qur'an dan As-Sunah yang menguatkan atau membatalkan. *Al-mashlahah al-mursalah* adalah pertimbangan penetapan menuju masalah yang harus didasarkan dan tidak bisa tidak.

4) *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah*.

*Sadd al-Dzari'ah* adalah upaya pengendalian masyarakat menghindari kemafsadatan dan *Fath al-Dzari'ah* adalah upaya perekayasaan masyarakat mencapai kemaslahatan. *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah* adalah "alat" dan bukan "tujuan", contohnya ialah pelaksanaan jam malam, larangan membawa senjata dan peraturan kependidikan. Pengendalian dan perekayasaan berdasar *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah* dapat diubah atau dikuatkan sesuai situasi.

5) *Al-'Adah*

Kata *Al-'Adah* disebut juga *Urf*. *Al-'Adah* terdiri dua macam, yaitu :*al-'adah ash sholihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *syara'* dan *al-'adah al-fasidah* yaitu adat yang bertentangan *syara'*. Dalam hal *Al-'adah* berlaku kaidah: العادة محكمة "Adat bisa menjadi hukum"

6) *Al-Istihsan*

*Al-Istihsan* secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam

umum. Dengan kata lain berpindah menuju dalil yang lebih kuat atau membandingkan dalil dengan dalil lain dalam menetapkan hukum. Contoh : menurut sunnah tanah wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya dengan dijual atau diwariskan, tapi jika tanah ini tidak difungsikan sesuai tujuan wakaf, ini berarti mubazir. Al-Qur'an melarang perbuatan *mubazir*, untuk kasus ini maka diterapkan istihsan untuk mengefektifkan tanah tersebut sesuai tujuan wakaf.<sup>21</sup>

#### 7) *Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah*

Kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah* adalah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, perlu memerhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.

### 3. Kewenangan Penguasa (Khalifah/Presiden) Dalam Mengatur Kepentingan Umum Berdasarkan Siyasah

#### a. Pengertian Siyasah Syar'iyah

Siyasah *syar'iyah* berasal dari bahasa arab. Siyasah berarti mengatur dan *syar'iyah* syarak atau aturan-aturan yang bersumber dari ajaran islam. Maksudnya adalah wewenang penguasa dalam pemerintahan islam untuk mengatur kepentingan umum berdasarkan syarak. Kata siyasah sering

---

<sup>21</sup>Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta, Raja Wali Pers, 1993), halm. 27-39



diartikan dengan “politik” yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “polis” yang berarti kenegaraan. Kata siyasah yang berarti kenegaraan sudah digunakan sejak masa Rasulullah SAW.

Dalam tinjauan fiqih, siyasah *syar’iyyah* bisa berarti pula pembentukan hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umum (*maqasidusy-syar’iyyah*). Menurut *Abdul Wahab Khalaf*, ahli fiqih dari mesir, siyasah *syar’iyyah* adalah wewenang penguasa dalam negara Islam untuk mengatur kepentingan umum berdasarkan syarak dan kaidah umum yang berlaku. Tujuannya adalah agar rakyat memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan, meskipun upaya tersebut tidak sejalan dengan ijtihaad para ulama.

Adapaun yang dimaksud dengan kepentingan umum disini adalah segala peraturan dan perundang-undangan negara. Menurut *Ibnul-Qayyim al-Jauziyyah* (691-751 H), ahli fiqih *Mazhab Hanafi*, meskipun tidak ada wahyu dan hadis yang mengatur tentang pemberian wewenang tersebut, selama tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam, maka penguasa berhak melakukannya.<sup>22</sup>

b. Bagian-Bagian SiyasahSyar’iyyah

---


<sup>22</sup>A. Musthofa Hadna, *Mengkaji Siyasah Syar’iyyah*, Erlangga, Pemalang, 2011, halm 8

Yang termasuk kedalam bagian-bagian siyasahsyar'iyah adalah sebagai berikut

1) Khilafah

a) Pengertian khilafah

Khilafah berasal dari kata *khalafah-khalafah*, artinya pengganti. Khalifah artinya orang yang mengganti. Khilafah disebut juga imamah, secara bahasa berarti kepemimpinan. Artinya secara istilah adalah sistem pemerintahan yang pelaksanaannya diatur berdasarkan syari'at Islam. Jadi, khilafah adalah kepemimpinan umumbagi seluruh kaum muslim di seluruh dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.<sup>23</sup>



Pada dasarnya mendirikan khilafah adalah wajib bagi seluruh kamu muslim. Pelaksanaannya sebagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, bagi umat Islam menurut kebutuhan, situasi, dan kondisi. Sistem khilafah ini telah dibuktikan dalam sejarah sejak masa *Khulafa'ur Rasyidin*, *Bani Umayyah* dan *Bani Abasyiah*. Khilafah dibentuk dalam

---

<sup>23</sup>Ade Shitu-Agbetola, "Theori of al- Khilafah in The Religion-Political View of Sayyid kutb, dalam Hamdar Islamicus: Quartely journal of Studies and Researchin Islam, Summer, 1991, h. 25.

rangka melaksanakan hukum syariat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-maidah ayat 48:

نَا الْكِتَابِ مِنْ يَدَيْهِ بَيِّنَاتٍ لِمَا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا  
آءَكَ عَمَّا أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعُوا وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَبَيِّنُهُمْ فَاحْكُمْ عَلَيْهِمْ وَمُهِمَّ  
لَجْعَلَكُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ وَرَثَتُهَا جَا شَرَعًا مِنْكُمْ جَعَلْنَا الْكُلَّ الْحَقِّ مِنْ ج  
مُ اللَّهُ إِلَى الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا آتَنُكُمْ مَا فِي لِيَبْلُوكُمْ وَلَكِنْ وَحْدَةً أُمَّةً  
تَحْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ جَمِيعًا مَرْجِعُكُمْ

Artinya

*Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu, (QS. Al-Maidah: 48).<sup>24</sup>*

Dan terdapat pula firman Allah SWT. Dalam Q.s An-nuur ayat 55:

<sup>24</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hal. 33.

ضَرَفِي لَيْسَتْخَلَفْنَهُمُ الصَّالِحِينَ وَعَمِلُوا مِنْكُمْ أَمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ  
 الَّذِي دِينُهُمْ هُمْ وَلِيْمَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الَّذِينَ أَسْتَخْلَفَكُمْ مَا الْأَرْ  
 بِئِشْرُكُونَ لَا يَعْبُدُونِي أَمَّا خَوْفُهُمْ بَعْدَ مِنْ وَلِيْبَدْلَهُمْ هُمْ أَرْتَضَى  
 ۞ أَلْفَسِقُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ ذَٰلِكَ بَعْدَ كَفَرُوا مِنْ شَيْءًا

Artinya:

*Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. (Q.S An-Nur: 55).<sup>25</sup>*

Dengan demikian, mendirikan khilafah sangat diperlukan oleh umat Islam, sejauh dimungkinkan dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban sekaligus membina kesatuan dan persatuan serta dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan umat Islam secara keseluruhan.

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang menjelaskan bentuk, sifat, dasar, pilar, struktur, asas yang menjadi landasan, pemikiran, konsep, serta standar-standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat serta undang-undang dasar dan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hal. 90

## b) Dasar-Dasar Khilafah

- 1) Dasar *tauhid* atau mengesakan Allah SWT. Khilafah yang dibangun Rasulullah SAW berprinsip untuk menegakkan kalimat Allah SWT serta untuk memudahkan dalam menyebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Di Indonesia dikenal dalam prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) *Ukhuwah islamiyah* atau prinsip persatuan, yakni khilafah ini dimaksudkan untuk menggalang persatuan dan persaudaraan berdasarkan Islam.
- 3) Adanya persamaan derajat sesama umat Islam, sebagai dasar pembentukan khilafah. Prinsip ini sangat tepat, karena pada dasarnya setiap manusia itu derajatnya sama yang membedakan satu sama lain adalah ketaqwaannya
- 4) Prinsip musyawarah atau kedaulatan rakyat.
- 5) Dasar keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat khususnya umat yang dibawah naungan khilafah bersangkutan. Prinsip ini menekankan bahwa khilafah harus mementingkan persamaan hak bagi seluruh warga.<sup>26</sup>

## c) Landasan hukum khilafah

---


<sup>26</sup>Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Cet. 3, h. 45



Sebagaimana dikatakan oleh *Al Mawardi* bahwa hukum menyelenggarakan khilafah adalah *fardhu kifayah* (tugas kolektif), maka praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan menjadi persoalan prinsip, karena menyangkut keberadaan dan keberlangsungan umat Islam. Adapun landasan pelaksanaan khilafah adalah sebagai berikut :

- 1) *Ijma'* Sahabat. Sewaktu Rasulullah SAW wafat, para sahabat tidak langsung memakamkan beliau, tetapi para mereka mendahulukan permusyawaratan khilafah. Setelah melalui berdebatan sengit, terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah, baru kemudian mereka memakamkan Rasulullah SAW.

- 2) Firman Allah dalam Q.s an Nisa' : 59



إِن مِّنكُمْ إِلَّا مَرْوَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا مَنْوَالَّذِينَ يَتَأْمُرُونَ

بِرِوَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِن وَالرَّسُولِ إِلَهِ إِلَى فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فِ

تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَٰلِكَ إِلَّا خ

Artinya:


*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah*

*dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>27</sup>

Dalam praktik penyelenggaraan negara tidak ada petunjuk yang tegas mengenai pentingnya khilafah, tetapi Al Qur'an secara tegas menetapkan tiga dasar utama dalam bermasyarakat, yaitu : keadilan (al 'adalah), musyawarah, dan kepatuhan (altha'ah).

d) Tujuan khilafah

Tujuan khilafah ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan secara umum adalah untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin, serta mendapatkan perlindungan dan memperoleh ampunan serta ridho Allah SWT.



Manusia sebagai khalifah di bumi berkewajiban menjaga kelestarian demi terwujudnya negeri yang baik yang mendapat ampunan dari Allah SWT. Melestarikan sumber daya alam bukan hanya membiarkan alam, sehingga manusia tidak dapat mengambil manfaat apapun. Akan tetapi, bagaimana manusia secara terus menerus mengolah, memanfaatkan secara baik dan benar dengan tidak merusak alam. Keseimbangan alam dengan lingkungan haruslah dijaga agar dinamika

---

<sup>27</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hal. 93.

populasi dan produktivitas sumber dayanya dapat dioptimalkan dalam rangka menunjang kehidupan manusia.

Adapun tujuan khilafah secara khusus sebagai berikut:

Melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah nabi Muhammad SAW.wafat.Maksudnya, bukan berarti mengganti kedudukannya sebagai Nabi tetapi sebagai pemimpin dan melanjutkan risalah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

1) Berupaya untuk memelihara keamanan dan ketahanan negara dan agama.

2) Mengupayakan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

3) Mewujudkan dasar-dasar *khilafah* (pemerintahan) yang adil dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam.<sup>28</sup>

## 2) Khalifah

### a) Pengertian Khalifah

*Khalifah* adalah orang-orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syarak. Dengan kata lain, kahlifah adalah orang-orang yang menggantikan Rasulullah dalam kedudukannya sebagai pemimpin dan kepala negara setelah

---

<sup>28</sup> Jurnal Al Adalah 11 (2), 205-222, *Metode Penetapan Hukum Islam menurut Al-Syathibi*, D Duski

beliau wafat. Jadi, kedudukan khalifah tidak untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi yang terakhir, tetapi hanya untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian.

Khalifah pertama yang diangkat oleh umat Islam adalah *Abu Bakar Siddiq*, yang dilanjutkan oleh *Umar bin Khathab*, *Usman bin Affan*, dan yang terakhir *Ali bin Abi Thalib*. Keempat khalifah di atas merupakan sahabat yang paling dekat dengan Nabi yang kemudian disebut *Khulafaur Rasyidin*.

Jabatan khalifah selanjutnya dipangku oleh para pemuka Islam dari *Bani Umayyah*, seperti *Umayyah bin Abi Sufyan*, dan Khalifah *Umar bin Abdul Aziz*. Sedangkan pada masa *Bani Abbasiyah* dipegang oleh *Harun Al-Rasyid*.

Dengan demikian, khalifah adalah orang yang diangkat oleh kaum muslim. Oleh karena itu, khalifah merupakan wakil umat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum syarak.<sup>29</sup>

Dasar hukum kemaslahatan umat dalam Al-quran surat An-Nur ayat 49:

﴿مُذْعِنِينَ إِلَيْهِ يَأْتُوا الْحَقُّ هُمْ يَكُنُونَ﴾

---

<sup>29</sup> Abu A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1993), Cet. IV, h. 112-114

*Artinya:*

*Tetapi jika Keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh.<sup>30</sup>*

b) Syarat- syarat Khilafah

Seseorang untuk bisa diangkat menjadi khalifah harus memiliki kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam, khilafah adalah sistem pemerintahan berdasarkan hukum Islam, karenanya pemimpinnya harus beragama Islam.
- 2) Memiliki ilmu pengetahuan yang luas, cakap, dan menguasai teori ilmu pengetahuan karena ia akan memimpin umat dan akan melaksanakan hukum-hukum Allah. Dengan demikian ia dapat mengambil keputusan dengan tepat.
- 3) Bersikap adil, jujur dan tidak melakukan tindakan- tindakan yang melawan hukum.
- 4) Pemberani. Seorang pemimpin harus berani melawan musuh, bertindak tegas dalam menghadapi lawan dan berani berdiplomasi untuk kepentingan negara, bangsa, dan agama.
- 5) Sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik serta sanggup bekerja dalam durasi waktu yang lama.

---

<sup>30</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hal. 70



Selain persyaratan di atas, seorang pemimpin harus penyabar, lapang dada, tidak ambisius jabatan dan pandai mencari solusi setiap kesulitan yang muncul.<sup>31</sup>

c) Pengangkatan dan Baiat Khalifah

Yang berhak mengagkat khalifah itu pada prinsipnya adalah seluruh umat Islam. Karena Islam menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Pengangkatan khalifah berdasarkan sejarah, dilakukan sebagai berikut :

- 1) Dipilih oleh para pemimpin umat. Umpamanya pemilihan atas khalifah pertama Khalifah *Abu Bakar* di perkampungan *Bani Sa'idah*.
- 2) Diusulkan oleh khalifah terdahulu, seperti pemilihan khalifah *Umar bin Khattab* atas saran khalifah *Abu Bakar*.
- 3) Dipilih langsung oleh tiap rakyatnya. Seperti pemilihan khalifah *Umar bin Abdul Aziz*.
- 4) Karena ia berjasa mengembangkan Islam ke suatu daerah dan disetujui oleh rakyatnya. Seperti pemilihan *Sultan Salim* di Mesir.

Jadi dari sifat pemilihan diatas terlihat bahwa seorang khalifah harus mementingkan kepentingan rakyatnya.

---

<sup>31</sup>Taqiyuddin an-Nabhani, *Pemerintahan dalam Islam*, (Jakarta: HTI Prees, 2002)  
Cet.2,  
h, 20

Adapun mengenai bentuk pemilihan tersebut diatas, dapat disimpulkan atas dua bagian yaitu :

- (1) Pemilihan secara langsung, yakni suatu pemilihan yang setiap rakyatnya dapat secara langsung menentukan pilihannya sesuai yang dikehendaki untuk menjadi khalifah.
- (2) Pemilihan secara tidak langsung, yaitu pemilihan melalui ahlulhalliwalaqdi atau wakil-wakil rakyat yang berhak menentukan/memutuskan segala sesuatu yang berkaitan kehidupan umat Islam.

Baiat artinya sumpah kepercayaan dan tanda kesetiaan. Baiat ini dilakukan oleh kaum muslimin didalam suatu majlis.

Setelah khalifah, lalu ia diminta untuk mengucapkan janji atau sumpah setia untuk menerima tanggungjawab serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai khalifah menurut aturan yang telah ditetapkan dengan mengambil/menyatakan Allah sebagai saksi.<sup>32</sup>

d) Hak dan Kewajiban Rakyat

1) Hak-hak Rakyat

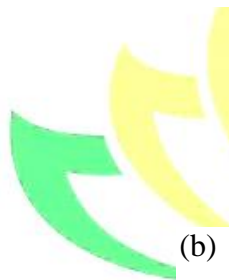
---

<sup>32</sup> Muhammad Jalal Syaraf Ali Abd al-Mu`thi Muhammad, *Al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam*, (Iskandariyah: Daar al-Jami`at al-Mishriyat, 1978), h. 72-73

Hak-hak rakyat itu pada dasarnya sama dengan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara, misalnya hak untuk hidup dengan aman, hak kemerdekaan, hak mengeluarkan pendapat, hak mendapatkan jaminan hukum, hak memperoleh pendidikan dan sebagainya.

Khalifah atau kepala negara bersama dengan aparat pemerintah harus melaksanakan dan melindungi hak-hak tersebut. Di bawah ini dikemukakan beberapa hak rakyat yang bersifat mendasar.

(a) Hak hidup dan jaminan keamanan



Hak hidup adalah suatu hak yang mulia sebagai karunia Allah SWT yang harus kita pertahankan, sebelum kita dipanggil kembali ke hadirat-Nya.

(b) Hak mengemukakan pendapat

Allah SWT menciptakan manusia dilengkapi dengan akal pikiran yang harus digunakan untuk berpikir dan berpendapat. Maka dari itu kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi.

(c) Hak mendapat keadilan

Hakikat manusia adalah sama dalam pandangan Allah SWT maka setiap manusia berhak mendapat keadilan di hadapan hukum dan pemerintahan.

(d) Hak kebebasan beragama

Kebebasan beragama merupakan hak yang mendasar, yakni setiap manusia berhak menentukan pendiriannya tentang keyakinan agama yang disukainya. Karena itu tidak dibenarkan memaksa seseorang untuk memeluk suatu agama.

2) Kewajiban Rakyat

Setelah rakyat memilih dan membaiai khalifah.

Maka rakyat memiliki kewajiban, yaitu:

(a) Mematuhi khalifah yang sah

Kewajiban mematuhi khalifah yang sah ini diperintahkan oleh Allah SWT. sepanjang khalifah itu tetap berpegang pada ajaran Allah dan Rasul-Nya.

(b) Berkewajiban mencintai tanah air dan sanggup mempertahankan dari gangguan musuh.

(c) Berkewajiban memelihara persatuan dan kesatuan.

**B. Bagaimana Kewenangan Presiden / Khalifah Terkait Kepentingan Umum Menurut Siyasah**

Dalam pandangan siyasah kewenangan presiden atau khalifah itu sangat mengutamakan kepentingan umat dan kemaslahatan umat berbangsa

dan bernegara, kemudian kewenangan presiden / khalifah dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Khalifah berhak mengadopsi hukum-hukum syariah yang memang dibutuhkan untuk memelihara urusan-urusan rakyat. Hukum-hukum itu harus digalidengan ijtihad, yang sah dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Dengan diadopsi oleh Khalifah, hukum-hukum itu menjadi undang-undang yang wajib ditaati, dan seorang pun tidak boleh melanggarnya. Dalilnya adalah Ijmak Sahabat. Hal itu karena lafal undang-undang merupakan istilah spesifik, yang maknanya

adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa untuk dijalankan oleh semua orang. Undang-undang didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah yang digunakan penguasa untuk memaksa semua orang agar mengikutinya dalam semua interaksi mereka. Artinya, jika penguasa telah memerintahkan hukum-hukum tertentu, hukum-hukum itu telah menjadi undang-undang yang mengikat semua orang. Jika penguasa tidak memerintahkan hukum-hukum tertentu, hukum-hukum tersebut tidak menjadi undang-undang, dan semua orang tidak harus terikat dengan hukum yang tidak diperintahkan penguasa. Dalam hal ini, kaum Muslim wajib terikat dengan hukum-hukum syariah, karena mereka wajib menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, dan bukannya wajib terikat dengan perintah dan



larangan penguasa. Artinya, yang wajib mereka jadikan pegangan adalah hukum syariah itu sendiri, bukan perintah penguasa.

2. Khalifah adalah penanggung jawab politik dalam negeri maupun luar negeri sekaligus. Khalifah juga yang memegang kepemimpinan atas angkatan bersenjata, ia memiliki hak untuk mengumumkan perang serta mengadakan perjanjian damai, gencatan senjata, dan seluruh bentuk perjanjian lainnya.

dalilnya adalah perbuatan Rasulullah saw., bahwa Beliau yang menunjuk para wali dan qâdhî sekaligus meminta pertanggungjawaban mereka. Beliau yang mengontrol praktik jual-beli dan mencegah terjadinya penipuan. Beliau yang membagi-bagikan harta kepada masyarakat. Beliau yang mengusahakan pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Beliau pula yang melangsungkan semua urusan negara di dalam negeri. Demikian pula, Beliau yang menyeru para raja. Beliau yang menerima para utusan. Beliau yang melaksanakan semua urusan luar negeri. Bahkan Beliau yang secara langsung memegang tampuk kepemimpinan angkatan bersenjata dan kadang-kadang Beliau sendiri yang memimpin berbagai peperangan dan pertempuran. Beliau pula yang mengirimkan detasemen dan menunjuk komandannya. Bahkan, ketika Beliau mengangkat Usamah bin Zaid sebagai komandan detasemen untuk dikirim ke negeri Syam, lalu banyak Sahabat yang tidak setuju karena usianya yang

masih terlalu muda, Beliau tetap memaksa para Sahabat untuk menerima kepemimpinan Usman. Hal itu menunjukkan bahwa Khalifah adalah panglima militer secara langsung dan bukan hanya panglima tertinggi (yang sebatas simbol). Di samping itu, Rasulullah saw. pula yang mengumumkan perang terhadap Quraisy. Beliau juga yang mengumumkan perang terhadap Bani Quraizhah, Bani Nadhir, Bani Qainuqa', Yahudi Khaibar, dan Romawi. Setiap peperangan yang terjadi, selalu Beliau yang mengumumkannya. Hal itu menunjukkan bahwa mengumumkan perang adalah semata-mata hak Khalifah.

3. Khalifah memiliki hak untuk menerima atau menolak para duta Negara asing. Khalifah juga berwenang mengangkat dan memberhentikan para duta kaum Muslim.
4. Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para Mu'awin dan para wali/gubernur (termasuk para amil). Mereka semuanya bertanggung jawab di hadapan Khalifah sebagaimana mereka juga bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat.
5. Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Qâdhî al-Qudhât (Kepala Kehakiman) dan para qâdhî (hakim) yang lain, kecuali Qâdhî Mazhâlim. Khalifahlah yang mengangkat Qâdhî Mazhâlim, sedangkan berkaitan dengan pencopotannya, Khalifah juga memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan para dirjen, panglima militer, komandan batalion, dan komandan kesatuan. Mereka

semuanya bertanggung jawab di hadapan Khalifah dan tidak bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat.

6. Khalifah memiliki wewenang mengadopsi hukum-hukum syaria yang menjadi pegangan dalam menyusun APBN. Khalifah memiliki wewenang menetapkan rincian APBN, besaran anggaran untuk masing-masing pos baik berkaitan dengan pemasukan maupun pengeluaran.

Kemudian terdapat pula dalil imam atau pemimpin yang berkaitan dengan kemaslahatan umat

الإِمَامُ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْ وَطِبَ الْمَصْلَحَةُ تَصَرَّفُ

Artinya :

*Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan*

Dalam Siyasah Syar'iyah terdapat tinjauan filosofi terkait khalifah dalam Islam, beberapa filosofis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.
- c. Menciptakan partisipasi aktif seorang muslim dalam aktifitas politik baik dalam rangka mendukung maupun mengawasi kekuasaan.

- d. Menegakkan sistem yang Islami dengan kekuasaannya, yaitu menyebarluaskan kebaikan dengan memerintahkan yang makruf.
- e. Menegakkan keadilan, menghentikan kedzaliman, dan menghancurkan kesewenang-wenangan.
- f. Mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara, baik dalam kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, berbudaya, dan lain sebagainya.
- g. Menjaga keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bernegara.

### C. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN PENGAMPUNAN HUKUMAN MENURUT ISLAM (SIYASAH)

#### 1. Pengampunan Hukuman (*Al-Syafa'at*) Menurut Islam

- a. Pengertian Pengampunan Hukuman (*Al-Syafa'at*) Menurut Islam.

Dalam dunia peradilan Islam, dikenal istilah pengampunan, dengan istilah *al-'afwu* (العفو) dan *al-syafa'at* (الشفاعة). Kata *al-'afwu* (العفو) merupakan bentuk *isim* yang mendapat imbuhan kata *al* (ال) di depannya, atau disamakan dengan kata *afwun* (عفو) dalam bentuk masdar-nya, yang secara segi bahasa mengandung arti hilang, terhapus, memberi dengan penuh kerelaan dan pemaafan.

Sedang kata *al-'afwu* (العفو) menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh *Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy* adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.

Dan kata *al-syafa'at* sebagaimana hadis *atsar* yang diriwayatkandari Imam Malik yang didefinisikan oleh *Fakhruddin al-Razi* (ahli fiqh mazhab Maliki) dengan makna “suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi”.<sup>33</sup>

Selanjutnya, kata *al-syafa'at* (الشفاعة) dalam kamus bahasa arab merupakan lawan kata dari *al-witru* (الوتر) -ganjil- yang mengandung arti genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan.

Adapun kata *al-syafa'at* (الشفاعة) sendiri berasal dari kata *syafa'a* (شفع) yang juga berarti menghimpun, mengumpulkan atau menggandakan sesuatu dengan sejenisnya.

Adapun definisi *al-syafa'at* menurut *Ali bin Muhammad al-Jurjani*, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab *Maliki* sekaligus pengarang kitab *al-Ta'rifat*, bahwa *al-syafa'at* adalah suatu permohonan untuk dibebaskan dan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Pengampunan Hukuman (*Al-Syafa'at*)

---

<sup>33</sup>Abdul Aziz Dahlan (et.al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 411.

<sup>34</sup>Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), hal. 127.



Adapun dasar hukum tentang adanya konsep *al-afwu* atau *alsyafa'at* dalam hukum Islam adalah sebagai berikut;

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 178

جِدُوا الْعَبْدَ بِالْحُرِّ الْحُرُّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتُوا  
أَدَاءً بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعُوا شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عَفَى فَمَنْ بِالْأَنْثَى وَالْأَنْثَى بِالْع  
ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مَنْ تَخَفِيفُ ذَلِكَ بِحَسَنِ إِلَيْهِ  
الْيَوْمَ عَذَابٌ لَهُ

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>35</sup>

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT.

Telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi sebagai ahli waris korban untuk menuntut qishas atau

<sup>35</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hal. 43.

memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari sini muncullah suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan dimana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh. Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.<sup>36</sup>

2) Surat An-Nisa" ayat 85

لَهُ دِيكُنْ سَيِّئَةً شَفَعَةً يَشْفَعُ وَمِنْ مَنَّا نَصِيبٌ لَهُ دِيكُنْ حَسَنَةً شَفَعَةً يَشْفَعُ مَنْ

مُقِيَّتَا شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ مِنْهَا كِفْلٌ

Artinya:

*Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*<sup>37</sup>

Ayat ini mengandung arti bahwa syafa'at ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam memberikan syafa'at tersebut. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan syafa'at berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang

<sup>36</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asa Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 260.

<sup>37</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, hal. 173.

meminta *syafa'at* merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji.

Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menafsirkan ayat inidengan menyatakan bahwa siapa yang sudi mengenakan yang ganjil, menyamai Rasul dalam perjuangannya sebab beliau sendiri yang mula-mula diperintahkan Tuhan. Maka, orang yang mengenakan panggilan itu dengan baik, niscaya dia akan mendapat keuntungan atau *nashib* (bagian). Tetapi, barang siapa yang mengenakan itu tidak baik, tidak jujur, setengah hati, mundur di tengah jalan, atau mau enaknya saja, niscaya dia akan menanggung dan dia akan menderita tersebut *syafa'at* yang buruk itu. *Jarullah Al-Zamakhsari* didalam tafsirnya menyebutkan, bahwa *syafa'at* yang baik ialah yang digunakan untuk memelihara dan menjaga sesama muslim, menolak kejahatan dan meraih kebaikan, dan dalam semua sikap hanya satu yang diharapkan yaitu wajah Allah, bukan mengharap *rasywah* (uang suap). Maka dari itu, hendaklah yang mendapatlan *syafa'at* adalah perkara yang dibolehkan oleh Syara' dan bukan didalam usaha melanggar batas-batas ketentuan Allah, atau melangkahi batas-batas kebenaran.<sup>38</sup>

Dengan kata lain memberikan *syafa'at* dalam surat An-Nisa ayat 85, bertujuan supaya seseorang ataupun sekelompok

---

<sup>38</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz V- VI*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2004), Cet. IV, hal. 235.

orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai seorang warga negara, karena *syafa'at* diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan makna dari ayat tersebut, barangsiapa yang memberikan dari saat ke saat, untuk siapa dan kapan saja *syafa'at* yang baik, yakni menjadi perantara sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan barangsiapa yang memberikan *syafa'at*, yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan memikul bagian dosa dari usahanya. Allah SWT. sejak dulu hingga kini dan seterusnya Maha kuasa atas segala sesuatu.<sup>39</sup>

### 3) Surat Al-A'raf ayat 199

الْجَاهِلِينَ عَنْ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرَ الْعَفْوَ حُذِّ

*Artinya:*

---

<sup>39</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2, Cet. I, hal. 511.

*Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*<sup>40</sup>

b. Hadits

Dalam beberapa hadits juga memberikan keterangan bahwapengampunan dianjurkan dalam suatu perkara tindak pidana selamaitu memang masih bisa dimungkinkan. Sebagaimana hadits yangdiri wayatkan dari Arfajah Al-Asyja'izsebagai berikut:

فَاقْتُلُوا هُجَمَاءَكُمْ، يَفْرَقُوا عَصَائِمَ سَفَائِرٍ يَدُوٍّ، رَجُلٍ لَجَمِيعٍ وَأَمْرُكُمْ أَتَاكُمْ، مَنْ

Artinya:

*"Siapa yg mendatangi kalian dlm keadaan kalian telah berkumpul/bersatu dlm satu kepemimpinan kemudian dia ingin memecahkan persatuan kalian atau ingin memecah belah jamaah kalian mkperangilah/bunuhlah orang tersebut."*<sup>41</sup>

Keterangan dari hadits di atas, merupakan sandaran hukumbagi seseorang yang mempunyai otoritas dalam memutuskan suatu perkara, baik oleh seorang hakim maupun penguasa, apabilamenemukan keraguan dalam menilai suatu *jarimah* yang dilakukandan dituduhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang akan diputuskannya. Sehingga seorang imam atau *qadhi* dituntut supaya lebih cermat dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan suatu perkara.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, hal. 340.

<sup>41</sup>Abu „Isa Muhammad bin „Isa at-Tirmizdi, *Sunan At-Tirmizdi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hal. 436. Lihat juga Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin „Ali al-Baihaqi, *As-Sunan Al-*

*Kubra*, (India: Majlis Dairah al-Ma'arif, 1344 H), Juz. 8, Cet. I, hal. 238.

Akan tetapi seorang hakim atau imam juga tidak boleh sertamerta begitu saja memberikan pengampunan jika suatu perkara dari seorang pelaku *jarimah* tersebut telah diajukan kepadanya.

### 3. Pendapat Ulama” Tentang Praktek Pengampunan Hukuman (*Al-Syafa'at*)

Tentang praktek Pengampunan Hukuman dalam hukum Islam, ulama- ulama fiqih saling berbeda pendapat satu sama lain, dalam permasalahan ini yang akan dibahas adalah pengampunan terhadap pemberontak yang dalam islam nya di kenal sebagai Al-Baghyu yang berarti mencari atau menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman.<sup>42</sup> Hal ini sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raaf ayat 33 :

مَا بِاللّٰهِ تُشْرِكُوْا اِنَّ الْحَقَّ يَغِيْرُوْا الْبَغْيَ وَالْاِثْمَ بَطْنٌ وَمَا مِنْهَا ظَهْرٌ مَا الْفَوْ حِشْرَ رَبِّيْ حَرَّمَ اِنْ مَّا قُلْ  
تَعْمُوْنَ لَا مَا لِلّٰهِ عَلٰى تَقُوْلُوْا اَوْ اَنْ سُلْطٰنًا بِهِ يُنْزِلُ لَمْ

Artinya:

*Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."*<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Zainuddin Ali, Hukum pidana Islam, (jakarta: sinar grafika, 2005) halm 73

<sup>43</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, hal. 56.



Adapun sanksi pemberontakan serta pengampunan hukumanpertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan, baik pidana maupunperdata, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi tindak pidananya.Pertanggung jawaban sebelum*mugholabah* dan sesudahnya berbedadenganpertanggungjawaban atas tindakan pada saatterjadinya *mughalabah*(penggunaan kekuatan).<sup>44</sup>

1. Pertanggungjawaban sebelum *mugholabah* dan sesudahnyaOrangyang melakukan pemberontakan dibebani pertanggungjawaban atassemua tindak pidana yang dilakukannya sebelum mugholabah(pertempuran), baik perdata maupun pidana, sebagai pelaku jarimahbiasa. Demikian pula halnya jarimah yang terjadi setelah selesainyamugholabah (pertempuran). Apabila sebelum terjadinyapemberontakan itu ia membunuh orang, ia dikenakan hukumanqishosh. Jika ia melakukan pencurian maka ia dihukum sebagai pencuri, yaitu potong tangan apabila syarat-syarat terpenuhi. Apabila ia merampas harta milik orang lain maka ia diwajibkan menggantikerugian. Jadi dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak, meskipun tujuan akhirnya pemberontakan.
2. Pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat mugholabahTindak pidana yang terjadi pada saat-saat terjadinya pemberontakan dan pertempuran ada dua macam, yaitu :

---

<sup>44</sup>Ahmad wardi muslich, Hukum Pidana Islam (jakarta: Sinar Grafika, 2010) halm 116.

a. Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan yang dimaksud disini adalah seperti halnya merusak jembatan, mengebom gudang amunisi, merusak gedung pemerintahan, membunuh para pejabat atau menawannya, semuanya itu tidak dihukum dengan hukuman jarimah biasa melainkan dengan hukuman jarimah pemberontakan. Yaitu hukuman mati tidak ada pengampunan. Dengan cara melakukan penumpasan yang bertujuan untuk menghentikan pemberontakannya dan melumpuhkannya. Apabila mereka telah menyerah dan meletakkan senjatanya, penumpasan harus dihentikan dan mereka dijamin keselamatan jiwa dan hartanya. Tindakan selanjutnya, pemerintah (ulil amri) boleh mengampuni mereka atau menghukum mereka dengan hukuman ta'zir atas tindakan pemberontakan mereka, bukan karena jarimah atau perbuatan yang mereka lakukan pada saat terjadinya pemberontak setelah mereka dilumpuhkan dan ditangkap adalah hukuman ta'zir.

b. Tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pemberontakan yang dimaksud disini adalah tindak pidana yang terjadi saat berkecamuknya pertempuran tetapi berkaitan dengan pemberontakan, seperti minum minuman keras, zina atau pemerkosaan dan dianggap sebagai jarimah biasanya sedangkan pelakunya dihukum sesuai dengan hukuman hudud dengan jarimah yang tela mereka lakukan. Dengan demikian jika ada

seseorang yang berzina pada waktu berkecamuknya peperangan (pemberontakan) maka ia dikenakan hukuman jera (jilid) seratus kali ditambah dengan pengasingan.

Adapun pertanggungjawaban perdata bagi para pemberontak tidak ada jika mereka merusak dan menghancurkan aset-aset negara yang dianggap oleh mereka perlu dihancurkan. Adapun kerusakan harta secara individu yang menyangkut kekayaan individu maka mereka tetap dibebani pertanggung jawaban perdata. Dengan demikian, barang yang diambil harus dikembalikan dan yang dihancurkan harus diganti. Pendapat ini dikemukakan oleh imam hanafi dan pendapat yang shohih di kalangan madzhab syafi'i. Namun, di kalangan madzhab syafi'i ada yang berpendapat bahwa pemberontak harus bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya seperti halnya hancur dan hilangnya benda atau yang lain baik yang berkaitan dengan pemberontakan atau tidak, karena hal itu mereka lakukan dengan tujuan melawan hukum.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Makhrusmunajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta; SUKSES offset, 2011) halm 158

### **BAB III**

#### **HAK PRESIDEN RI**

#### **DALAM MEMBERIKAN ABOLISI**

##### **A. Pengertian dan Latar Belakang Lahirnya Abolisi di Indonesia**

###### **1. Pengertian Abolisi**

Abolisi berasal dari bahasa Inggris, “*abolition*”, yang berarti penghapusan atau pembasmian. Menurut istilah abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Artinya, abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

Dari definisi diatas, tentu dapat diketahui bahwa sebenarnya abolisi bukanlah suatu pengampunan dari Presiden kepada para terpidana. Tetapi merupakan sebuah upaya Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka. Karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Dan juga Abolisi adalah sebuah keputusan yang sudah di sahkan untuk menghentikan pemeriksaan, pengusutan dan penelitian sebuah kasus

atau perkara yang relatif berat, saat pihak pengadilan belum menjatuhkan atau memutuskan atau mengetuk palu atas perkara tersebut, dimana penghentian pemeriksaan tersebut diberikan dengan adanya pertimbangan demi alasan umum karena perkara tersebut berkaitan dengan kepentingan dan urusan negara yang tidak mempunyai kelayakan untuk dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

Karena jika seorang pidana atau terdakwa melakukan sebuah kejahatan yang meresahkan masyarakat bukan berarti dia tidak punya jasa jasa sama sekali selama masih menduduki jabatannya untuk kepentingan rakyat. Manusia memang memiliki ambisi yang kuat yang mungkin bersifat jahat tetapi pada hakekatnya manusia mempunyai sisi yang baik juga. inilah yang akan menjadi pertimbangan pihak DPR untuk selanjutnya.

Abolisi cenderung diberikan pada kasus kejahatan yang tidak kecil tetapi kasus yang relatif besar . Motif untuk melakukan abolisi banyak ragam dan jenisnya, tetapi pada kenyataannya pertimbangan tentang untung rugi yang akan didapat dalam skala besar dapat mempengaruhi abolisi itu sendiri, akan cepat diberikan atau tidak, akan mendapatkannya atau tidak. Untung rugi dalam skala besar bisa dianalisis berupa efek yang telah terjadi pada pihak yang dirugikan dan yang diuntungkan misalnya keluarga korban , negara, masyarakat luas, secara kelompok tertentu, atau pihak pihak lain dan sebagainya agar tidak menjadi [penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan](#).

Pengertian Abolisi dapat juga diartikan sebagai hak penuh yang dimiliki oleh kepala negara yang berhak untuk melenyapkan, membuang, melupakan sekaligus menghapus hak tuntutan pidana dan menghentikan jika sudah benar benar dilakukan, hal ini dapat terbaca dan di umumkan dengan jelas pada pasal 1 angka 1 UU no.22 tahun 2005 serta tentang hak abolisi yang akan diberikan dengan memperhitungkan dan menganalisa dengan pertimbangan pertimbangan apakah kasusnya bisa mengancam stabilitas negara atau tidak atau atas pertimbangan lain misalnya atas jasa jasanya dimasa lalu.<sup>46</sup>

## 2. Latar Belakang Lahirnya Abolisi di Indonesia

Yang melatar belakangi lahirnya abolisi di indonesia adalah karena marak nya para pemberontak pada masa kepemimpinan presiden pertama Ir Soekarno. Dengan marak nya kasus-kasus pemberontakan pada kala itu maka peresiden Soekarno mengeluarkan kebijakan Abolisi dengan di kuatkan oleh dasar hukum yaitu UUD 1945 pasal 14 ayat 2 dan di atur pula dalam UU No 22 Tahun 2005 pasal 1 angka 1 tentang Amnesti, dan Abolisi.<sup>47</sup>

Abolisi diberikan setelah berkonsultasi dengan anggota DPR di bidang hukum. Ini berarti abolisi bukan berdasarkan pertimbangan subjektif pribadi. DPR yang berarti orang banyak yang mewakili rakyat sudah menyetujui.

---

<sup>46</sup>Artikel ini diakses pada tanggal 20 september 2018 pada <http://www.google.co.id/amp/s/gurupkn.com/pengertian-abolisi/amp>

<sup>47</sup>Artikel ini diakses pada tanggal 20 september 2018 pada [http://www.google.co.id/amp/s/gurupkn.com/Lahirnya\\_abolisi/amp](http://www.google.co.id/amp/s/gurupkn.com/Lahirnya_abolisi/amp)

Pertimbangan selanjutnya dalam memberikan abolisi adalah memberikan kesempatan kepada terpidana untuk melakukan perubahan pada dirinya. Jika pidananya ringan secara hukum, sementara dampaknya secara nasional akan lebih baik diberikan abolisi. Harapannya, terpidana kemudian setelah dibebaskan tidak mengulangi perbuatannya bahkan menjadi pribadi lebih baik.

Kemudian Kasus yang diberikan atau dipertimbangkan untuk mendapatkan abolisi adalah kasus-kasus yang dianggap tidak dapat naik ke permukaan atau tidak dapat disidangkan. Kasus-kasus tersebut, misalnya berkas terbakar dan tidak mungkin melakukan pengusutan ulang, terpidana adalah orang yang sebelumnya melakukan hal penting bagi negara, kasus yang jika dilanjutkan akan membahayakan persatuan dan kesatuan negara, dan terpidana tidak mungkin mengikuti proses pengadilan karena sakit atau gangguan kejiwaan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, abolisi diberikan oleh Presiden sebelum memberikan abolisi juga sudah membaca dan mempelajari berkas perkara bersama staf ahli hukumnya. Di Indonesia abolisi pernah beberapa kali diberikan kepada seseorang dengan berbagai pertimbangan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia YLBHI. 2010. *"Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum"*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia



Hak Presiden dalam memberikan Abolisi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2005 karena lebih membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya.<sup>49</sup>

### 3. Perbedaan Abolisi Dan Amnesti

Di Indonesia sering kita dengar Abolisi dan Amnesti dalam kasus hukum atau kasus pengampunan hukuman dalam kasus tindak pidana. Dalam tugasnya, Presiden mempunyai hak secara hukum. Ini diatur dalam UUD 1945 pasal 14 ayat 2, Presiden mempunyai hak memberikan Abolisi dan Amnesti dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan berdasarkan kepentingan umum.

Sebelum masuk dalam penjelasan perbedaan Abolisi dengan Amnesti maka terlebih dahulu akan membahas pengertian Abolisi dan Amnesti.

#### a. Abolisi

Pengertian abolisi menurut KBBI adalah penghapusan hukuman yang sedang berjalan. Artinya, seseorang belum mendapatkan kepastian hukum atau hukuman tetap atau hakim belum ketok palu. Orang tersebut masih menunggu hasil keputusan akhir untuk menjalani masa hukuman. Abolisi meniadakan tuntutan hukum yang sedang berjalan. Proses hukum yang belum selesai dihentikan. Terduga pelaku pidana otomatis diberi kebebasan dan dapat menjalani hidup selanjutnya sebagaimana orang yang merdeka.

---

<sup>49</sup>Undang-Undang Dasar 1945; Amandemen I, II, III, IV

b. Amnesti

Secara bahasa, [pengertian amnesti](#) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI adalah pengampunan atau penghapusan hukuman. Menurut UU Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi, amnesti ini adalah penghapusan semua hukum pidana. Jadi, terpidana yang mendapat amnesti otomatis akan mendapatkan kebebasan dari hukuman selanjutnya.

c. Perbedaan Amnesti dan Abolisi

Sepintas, kedua hak Presiden, amnesti dan abolisi sama. Diatur dalam UUD 1945 pasal dan ayat yang sama. Keduanya membicarakan penghapusan hukuman. Namun, tentu saja keduanya ditulis berbeda karena memang berbeda. Perbedaan amnesti dan abolisi diuraikan di bawah ini:

1) Pelaksanaan

Pelaksanaan amnesti diberikan ketika hukum sudah diputuskan. Misalnya seseorang diputuskan bersalah dan mendapat hukuman 20 tahun penjara atau terpidana seumur hidup. Maka, ketika sudah berjalan penjara 2 tahun mendapatkan amnesti, hukuman dihapuskan. Dia tidak lagi menjalani hukuman selanjutnya.

Sementara, abolisi dilaksanakan ketika hukuman belum diputuskan. Terpidana masih dalam proses pengadilan dan mendapat tuntutan hukuman dari Jaksa. Mungkin, orang tersebut

sudah di penjara selama proses pengadilan. Biasanya setelah hukum diputuskan, masa tahanan akan dipotong masa tahanan selama proses pengadilan. Ketika Presiden memberikan abolisi, maka terpidana langsung bebas. Dia tidak lagi dapat diproses secara hukum. Semua proses dibatalkan. Proses pengadilan dapat dilakukan untuk kasus yang baru.

## 2) Penghapusan

Karena amnesti diberikan ketika terpidana sudah mendapat putusan hukum atau sedang menjalani hukuman tertentu, berarti amnesti menghapus semua hukuman yang diberikan. Termasuk seandainya terpidana mendapat hukuman denda atau hukuman lain.

Abolisi menghapus semua tuntutan hukuman. Kejaksaan yang biasanya memberikan tuntutan berdasarkan berkas perkara dan bukti pidana yang dimiliki dan telah dikumpulkan. Ketika terpidana mendapat mendapat abolisi, semua tuntutan dianggap batal dan tidak ada. Terpidana hanya dapat dituntut jika ada kasus pidana lain yang melibatkannya.

## 3) Jumlah Terpidana

Amnesti diberikan umumnya pada kasus yang memiliki jumlah terpidana sangat banyak. Karena jumlah yang banyak tersebut, Presiden menganggap akan mengganggu kepentingan umum atau memicu konflik ketika harus dilanjutkan. Maka

selanjutnya, Presiden akan meminta pertimbangan DPR untuk memberikan amnesti.

DPR dan seluruh anggotanya akan meninjau kasus dari berbagai sisi sebelum memberikan jawaban dan pertimbangan kepada Presiden. Abolisi diberikan kepada jumlah terpidana perorangan. Orang tersebut dipertimbangkan oleh DPR untuk tidak dilanjutkan proses hukumnya, terkait dengan kepentingan umum, jasanya kepada negara, dan lain-lain.

#### 4) Kasus

Amnesti yang diberikan kepada sekelompok orang kebanyakan terkait dengan tindakan politik. Contoh amnesti yang pernah diberikan adalah amnesti pada kelompok GAM. GAM singkatan dari Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan yang selama bertahun-tahun terjadi di Aceh dan dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak puas dengan kebijakan Republik Indonesia terhadap wilayahnya. Kelompok orang ini kemudian membentuk GAM untuk memerdekakan diri. Selama bertahun-tahun kelompok GAM mengganggu ketertiban masyarakat Aceh. Banyak pula korban berjatuhan. Ketika pemerintah memasuki zaman reformasi, kelompok ini menyerah. Pemerintah memberikan amnesti dengan berbagai catatan. Di antaranya dengan memberikan syarat kesetiaan kepada NKRI.

Abolisi diberikan kepada perorangan tidak selalu berkaitan dengan tindakan politik. Namun, proses hukum yang terjadi dapat memicu gangguan politik.

## **B. Pertimbangan Hukum dan Tujuan Pemberian Abolisi**

### **1. Pertimbangan hukum dalam perkara abolisi**

Perkara Abolisi di negara dengan tingkat keanekaragaman penduduknya yang luas seperti Indonesia, sistem presidensiil ini efektif untuk menjamin sistem pemerintahan yang kuat dan efektif. Namun seringkali, karena kuatnya otoritas yang dimilikinya, timbul persoalan berkenaan dengan dinamika demokrasi.

Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945, kelemahan sistem presidensiil seperti kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, diusahakan untuk dibatasi. Misalnya, Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” dan “Presiden memberikan amnesty dan abolisi dengan mempertimbangkan DPR”. Hal ini bertujuan agar hak prerogatif presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak.

Perubahan aturan mengenai hak prerogatif yudikatif Presiden itu memang memberikan pembatasan tersendiri bagi Presiden agar tidak dengan mutlak menggunakan kekuatan hukumnya untuk diberikan berdasarkan kepentingan politiknya saja. Misalnya seperti yang terjadi

pada penahanan dan pembebasan napol/tapol pada era orde baru dan orde lama.

Pada kasus kekinian yang sangat menyita perhatian masyarakat, wacana penggunaan hak-hak prerogatif Presiden kembali menguak seiring terbukanya kasus kriminalisasi petinggi KPK. Namun apa daya pada akhirnya Presiden tidak mengambil salah satu dari hak yudikatifnya sebagai upaya meluruskan proses hukum yang terjadi, karena UUD 1945 memang tidak memperbolehkannya campur tangan dalam proses hukum tanpa melalui pertimbangan MA dan DPR. Walaupun publik mengetahui dan dapat menilai bahwa dalam kasus itu, Mahkamah Agung (walau tidak secara institusi) juga terlibat.

Dari gambaran itulah kemudian, kita sebenarnya dapat menganalisa lebih jauh lagi mengenai efektivitas Pasal 14 UUD 1945 yang telah diamandemen, karena lebih membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya.<sup>50</sup>

Berdasarkan sejarah, upaya Presiden dalam ikut dalam penyelesaian suatu kasus melalui hak-haknya bukanlah hal yang asing dalam kehidupan bernegara Indonesia. Dalam hal pemberian Abolisi misalnya, sesungguhnya bukanlah hal baru di Indonesia mengingat pada masa Orde Baru sering diberikan Abolisi, termasuk perubahan status terpidana mati menjadi seumur hidup, pernah diberikan kepada Soebandrio dan Omar Dhani. Demikian pula terhadap sembilan terpidana lain (1980),

---

<sup>50</sup>Undang-Undang Dasar 1945; Amandemen I, II, III, IV

setelah itu, tidak kurang dari 101 permohonan Abolisi diberikan oleh presiden Soeharto. Tentu saja hal ini bukanlah jumlah yang sedikit, mengingat kekuasaan Orde Baru telah bertengger selama 32 tahun.

Di masa reformasi, masalah Abolisi juga sempat menjadi sesuatu yang menarik perhatian, dimana ketika itu Presiden Megawati Soekarnoputri menolak memberikan Abolisi kepada enam terpidana mati. Mereka adalah lima orang terlibat pembunuhan, dan satu orang dalam kasus narkoba.

Selain itu, dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden sedikitnya telah 3 kali menggunakannya dan kemudian menjadi polemik di masyarakat, yakni terhadap para aktivis PRRI/Permesta, DI/TII, dan yang terbaru, GAM. Pemberian amnesti dan abolisi ini menjadi polemik karena dikhawatirkan mereka akan kembali berkhianat dan berbuat makar kembali. Tetapi hal ini mungkin dapat dieliminir dengan adanya pernyataan berjanji setia kembali kepada NKRI.<sup>51</sup>

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2005, maka dapat kita ketahui bahwa Abolisi:

- a. Dapat dimohonkan pada pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- b. Permohonan Abolisi hanya dapat diajukan satu kali, kecuali dalam hal:

---

<sup>51</sup>Artikel ini diakses pada tanggal 20 september 2018 pada <http://www.google.co.id/amp/s/berita-negeri.com/amp>



- 1) Terpidana yang pernah ditolak permohonan abolisinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan abolisi tersebut;
- 2) Terpidana yang pernah diberi abolisi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian abolisi diterima.

c. Pemberian abolisi oleh Presiden dapat berupa:

- 1) Peringanan atau perubahan jenis pidana
- 2) Pengurangan jumlah pidana
- 3) Penghapusan pelaksanaan pidana.

d. Permohonan abolisi dapat diajukan oleh:

- 1) Terpidana atau Kuasa Hukumnya
- 2) Keluarga Terpidana, baik dengan persetujuan terpidana maupun tanpa persetujuan terpidana (bagi terpidana hukuman mati).<sup>52</sup>

## 2. Tujuan Pemberian Abolisi

- a. Abolisi hanya bisa diberikan pada terpidana dengan aturan undang-undang yang berlaku dan atas kuasa UUD oleh presiden setelah meminta nasehat dan konfirmasi dari mahkamah agung. Aturan ini sudah berlaku lama dan bisa dilihat pada pasal 107 ayat 3 UUD.<sup>53</sup>
- b. Abolisi diberikan pada terpidana untuk memberikan kesempatan baru agar terpidana dapat melakukan perbaikan terhadap kesalahan, kekhilafan dan kejahatan yang telah dilakukan, sehingga dapat kembali

---

<sup>52</sup>UU No. 22 Tahun 2002

<sup>53</sup>UU No. 22 Tahun 2000

beraktifitas dan melakukan kegiatan yang bermanfaat ditengah tengah masyarakat.

- c. Sebenarnya abolisi bukan sebuah pengampunan yang diberikan kepala negara terhadap terpidana kasus kejahatan yang berat, tetapi abolisi memiliki makna sebagai menghentikan sekaligus penghapusan penuntutan hukum terhadap kejahatan seseorang agar tidak lagi kasusnya naik kepermukaan dan menjadi urusan yang panjang, karena kasus tersebut dapat mengancam keseimbangan, kepentingan negara serta stabilitas pemerintahan yang ada.
- d. Kasus atau perkara yang relatif berat yang pernah mendapat abolisi adalah: kejahatan pembunuhan pada orang orang penting , korupsi, Gembong narkoba dikalangan pejabat , pelanggaran HAM, penghinaan dan memfitnah yang melewati batas terhadap kepala negara, perampokan uang negara, penipuan yang melibatkan kepala negara, ancaman dan aksi pembunuhan terhadap orang orang penting negara, pembunuhan yang terorganisir karena alasan penggulingan presiden (Kudeta) , penghasutan dan pencemaran nama baik yang telah melewati batas dan lain lain.
- e. Sejauh ini belum ada tindakan untuk menghapus abolisi terhadap terpidanaa korupsi, narkoba, [jenis jenis pelanggaran HAM](#) dan sebagainya, karena mengingat setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dimata hukum.

f. Dengan adanya grasi, amnesti dan abolisi maka sudah dipastikan akan ada pemotongan masa tahanan terhadap terpidana, maka mereka akan lebih cepat keluar dari penjara. Yang menjadi masalah adalah mengapa banyak diantara mereka (mantan narapidana) melakukan kejahatan yang sama setelah keluar dari penjara, dimana letak efek jeranya? Tidak ada salahnya sebaiknya presiden lebih cermat lagi dalam memberikan grasi, amnesti dan abolisi mengingat efek jera belum 100 persen mampu membuat mereka (bekas narapidana) menyadari jika kejahatan yang telah mereka lakukan adalah merugikan diri sendiri dan pihak lain.<sup>54</sup>



### C. Hak-hak Presiden

Hak prerogatif Presiden yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain.<sup>[3]</sup> Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Tugas pokok pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melaksanakan undang-undang. Untuk itulah dalam konsep negara hukum modern sekarang ini terdapat suatu lembaga kewenangan yang disebut *Freises Ermessen*, yaitu suatu kewenangan bagi pemerintah untuk turut campur atau melakukan intervensi di dalam berbagai kegiatan masyarakat guna membangun

---

<sup>54</sup> Artikel ini diakses pada tanggal 20 september 2018 pada <http://www.google.co.id/amp/s/berita-negeri,tujuanabolisidiindonesia.com/amp>

kesejahteraan masyarakat tersebut. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bersikap aktif.

#### 1. Hak Prerogatif Menurut UUD 1945 (Sebelum Amandemen)

Untuk melihat pengaturan mengenai Hak Prerogatif Presiden dalam ketiga UUD yang pernah berlaku di Indonesia tersebut, berikut ini dijelaskan mengenai sejarah singkat ketiga UUD tersebut beserta ketentuan-ketentuan Pasalnya yang mengatur mengenai Hak Prerogatif Presiden.

Dalam batang tubuh UUD 1945 tersebut terdapat Pasal-Pasal tentang hak prerogatif Presiden, yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 : Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Fungsi Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) yang dimaksud ini adalah untuk mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah lebih dahulu tercantum dalam undang-undang.
- b. Pasal 10 UUD 1945 : Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pasal 11 UUD 1945: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dari ketentuan Pasal 11 UUD 1945 di atas diketahui apakah akan perang ataupun damai dengan negara lain, rakyat turut menentukannya lewat perwakilannya di DPR.

- c. Pasal 12 UUD 1945: Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dalam undang-undang. Yang di atur dalam Pasal 12 UUD 1945 di atas pada pokoknya adalah bahwa yang berwenang menyatakan keadaan bahaya adalah Presiden, berarti melalui suatu keputusan Presiden
- d. Pasal 14 UUD 1945: Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Grasi adalah hak Kepala Negara untuk menghapuskan hukuman keseluruhannya ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim dengan keputusan yang tidak dapat diubah lagi kepada seseorang ataupun menukar hukuman itu dengan yang lebih ringan menurut urutan tersebut dalam Pasal 10 KUHP. Grasi diberikan kepada seseorang atas permohonan kepada Kepala Negara. Grasi diberikan dalam hal kejahatan biasa dan diberikan setelah selesainya penuntutan dan telah dijatuhkan hukuman. Jika kepada seseorang telah berikan grasi, kejahatan yang telah dilakukannya dan telah dijatuhkan hukuman itu dipandang masih ada, sehingga kalau ia mengulang berbuat kejahatan lagi, maka dalam hal ini dipandang ada pengulangan recidive sehingga berakibat memberatkan hukuman. Amnesti adalah hak Kepala Negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam terhadap suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan. Amnesti diberikan secara massal terhadap suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan. Dalam hal ini kejahatan yang dimaksud seolah-olah dilupakan dan

dipandang tidak ada, sehingga tidak berakibat hukum apa-apa. Amnesti lahir atas inisiatif Kepala Negara sendiri, bukan dimohon. Dalam hal amnesti, andaikata orang yang bersangkutan berbuat jahat lagi setelah adanya amnesti, disini kejahatan yang pertama yang diberi amnesti dipandang tidak ada lagi, sehingga kejahatan yang berikutnya tidak dipandang sebagai pengulangan dan tidak berakibat memberatkan hukuman. Abolisi adalah hak Kepala Negara untuk menggugurkan hak penuntutan umum buat menuntut seseorang. Abolisi berlaku dalam hak kejahatan politik seperti amnesti dan abolisi diberikan secara massal ataupun satu orang pada saat sebelum adanya penuntutan. Rehabilitasi adalah hak Kepala Negara untuk mengembalikan seseorang kepada kedudukan dan nama baiknya yang semula tercemar oleh karena suatu keputusan hakim yang tidak benar.

## 2. Hak Prerogatif Presiden UUD 1945 (Setelah Amandemen)

MPR RI telah menetapkan perubahan pertama UUD 1945 dalam sidang umum MPR RI tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Dalam amandemen UUD 1945 tersebut terdapat Pasal-Pasal tentang hak prerogatif Presiden, yaitu:

- a. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945: Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang membuat akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.

b. Pasal 14 UUD 1945:

a) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

b) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

c. Pasal 15 UUD 1945: Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

d. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

e. Pasal 23F ayat (1) UUD 1945: Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.

f. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945: Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.

g. Pasal 24B ayat (3) UUD 1945: Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

h. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945: mahkamah konstitusi mempunyai sembilan anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden



#### D. Contoh Kasus Pemberian Abolisi

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, abolisi diberikan. Presiden sebelum memberikan abolisi juga sudah membaca dan mempelajari berkas perkara bersama staf ahli hukumnya. Di Indonesia abolisi pernah beberapa kali diberikan kepada seseorang dengan berbagai pertimbangan. Contoh abolisi yang pernah diberikan di Indonesia antara lain:

##### a. Abolisi Kepada Pemberontak

Berdasarkan surat keputusan Presiden Nomor 568 Tahun 1961, 18 Oktober 1961 abolisi diberikan kepada pemberontak oleh Presiden Sukarno. Ini diberikan karena pada masa awal kemerdekaan sampai era tahun 1960-an banyak sekali terjadi pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia. Baik itu pemberontakan terkait dengan aspirasi wilayah itu sendiri maupun pemberontakan yang di belakangnya ada Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia.

Pemberian abolisi diharapkan membuat para pemberontak di berbagai wilayah berhenti dan menyerah. Beberapa pemberontakan yang terjadi antara lain : Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Pemberontakan Kahar Muzakar di Kalimantan, Pemberontakan Permesta di Sulawesi, Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, Pemberontakan DII / TII, dan lain-lain.

##### b. Abolisi Terhadap Pemberontak GAM

Abolisi terhadap pemberontak GAM diberikan bersamaan dengan amnesti. Para pemberontak GAM yang telah ditangkap dan dijatuhi

hukuman diberi kebebasan. Mereka diberi penghapusan hukuman. Sementara, para pemberontak GAM yang menyerah sebelum 15 September 2005 diberi abolisi. Mereka hanya dicatat dan tidak akan diproses di pengadilan. Mereka tetap menjadi orang bebas. Tentu saja, amnesti dan abolisi ini dibuat dengan persyaratan bahwa GAM menghentikan pemberontakan dan selanjutnya selalu setia kepada NKRI. Pemberian abolisi di sini adalah bagian dari [upaya menjaga keutuhan NKRI](#). Kemudian aturan tersebut dituangkan dalam Keppres Nomor 22 Tahun 2005 tentang pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam gerakan Aceh merdeka, setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik yang berada dalam negeri maupun luar negeri dan mencakup kepada semua anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Pertimbangan Presiden dalam memberikan abolisi adalah :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi nasional guna memperkuat kesatuan bangsa, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia serta untuk mengakhiri konflik secara permanen, perlu menciptakan suasana damai secara menyeluruh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Kerangka Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- b. Bahwa untuk mempercepat usaha rehabilitasi dan rekonsiliasi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami, perlu keterlibatan dan keikutsertaan seluruh potensi kekuatan bangsa :

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh merdeka maka ditanda tangani di Helsinki, Finlandia tanggal 15 agustus 2005, perlu menetapkan keputusan presiden tentang pemberian amnesti umum dan abolisi terhadap setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka



## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Dasar Hukum Abolisi dan Pertimbangan-pertimbangan Hukum Presiden Dalam Memberikan Abolisi**

Dasar hukum abolisi diatur dalam Undang-undang Dasar Pasal 14 ayat 2, UU No 19 tahun 1964 pasal 19 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Keppres Nomor 22 tahun 2005. Pertimbangan hukum presiden dalam memberikan abolisi terhadap suatu perkara yang sedang ditangani oleh penyidik untuk dihentikan penyidikan kasusnya. Dalam Keppres nomor 22 tahun 2005 Presiden dalam memberi abolisi banyak pertimbangan dan dengan mengutamakan kemaslahatan, keamanan dan kestabilan suatu negara .

Dengan demikian presidenpun memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan-alasan umum, mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut berkaitan dengan kepentingan suatu negara atau kemaslahatan umat. Dalam mengeluarkan abolisi presiden mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Dan dari definisi diatas jelas kita ketahui bahwasannya abolisi bukanlah suatu pengampunan dari Presiden kepada para terpidana. Tetapi merupakan sebuah upaya dari Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka. Karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan atau suatu negara. Abolisi cenderung diberikan pada kasus kejahatan yang tidak kecil tetap kasus yang relatif besar.

Abolisi merupakan suatu keputusan untuk memberhentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dan dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.

Kemudian seorang presiden pun memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan-asalan umum, mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut berkaitan dengan kepentingan suatu negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan sebuah pengadilan.

Dan dari definisi diatas jelas kita ketahui bahwasannya abolisi bukanlah suatu pengampunan dari Presiden kepada para terpidana. Tetapi merupakan sebuah upaya dari Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka. Karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan atau suatu negara. Abolisi cenderung diberikan pada kasus kejahatan yang tidak kecil tetap kasus yang relatif besar.

Dalam prinsipnya mengapa Presiden mengeluarkan Abolisi adalah agar suatu perkara yang membahayakan suatu negara atau bisa mengancam keutuhan suatu negara bisa teratasi dengan kebijakan tersebut, contoh kasus pemberian abolisi yang terjadi di indonesia yaitu Abolisi terhadap pemberontak GAM yang pada kala itu para pemberontak GAM yang telah ditangkap dan dijatuhi hukuman diberi kebebasan. Dengan adanya abolisi tersebut maka dibuat perjanjian bahwasanya GAM menghentikan pemberontakan dan selanjutnya selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Abolisi Dalam Perspektif Siyasah Dusturriyah**

Menurut siyasah dusturriyah yang mengatur antara negara dan warga negara, negara dan lembaga negara demi kemaslahatan suatu umat dalam berbangsa dan bernegara.

Maka dalam pandangan siyasah dusturriyah pemberian abolisi terhadap kasus tertentu demi keamanan suatu negara dan bangsa sudah tepat dan jelas jika pemimpin mengeluarkan hak atau sebuah keputusan demi menyelamatkan dan melindungi umatnya dari bahaya yang akan mengancamnya. Dan dalam konteks siyasah kita ketahui bahwa siyasah adala mengatur atau pimpinan yang membawa pada kemaslahatan umat, artinya dengan adanya abolisi dan amnesti yang diberikan oleh presiden terhadap kasus –kasus tertentu atau demi menjaga kepentingan suatu negara atau pertahanan suatu negara termasuk dalam siyasah.

Keterkaitan siyasah dalam skripsi ini adalah tergolong dalam siyasah dusturriyah yang dapat diartikan bahwa siyasah dusturriyah mengatur antara Negara dan lembaga Negara demi untuk kemaslahatan umat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan hak Presiden RI memberikan abolisi dalam perspektif siyasah, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dengan adanya hak abolisi seorang Presiden berwenang untuk dapat menghentikan suatu kasus yang menyangkut kepentingan suatu negara (pemberontak). Dengan adanya hak tersebut dapat menanggulangi kerusakan yang besar. Kemudian sebuah keputusan yang sudah disahkan untuk menghentikan pemeriksaan, pengusutan dan penelitian sebuah kasus atau perkara yang relatif berat, saat pihak pengadilan belum menjatuhkan atau memutuskan perkara tersebut, dimana penghentian pemeriksaan tersebut diberikan dengan adanya pertimbangan demi alasan umum karena perkara tersebut berkaitan dengan kepentingan dan urusan negara yang tidak mempunyai kelayakan untuk dikorbankan oleh keputusan pengadilan yang akan menjadi pertimbangan pihak DPR untuk ditindak lanjuti. Hak presiden mengeluarkan abolisi diatur juga dalam Keppres No.22 tahun 2005. Dan dalam pandangan siyasah adalah kewenangan dan kebijakan pemerintah, dalam lingkup kepala negara dan lembaga negara demi kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah.



2. Dalam pandangan siyasah dusturiyyah presiden sah memberikan abolisi dengan pertimbangan kemaslahatan atau keamanan negara. Kepala negara atau khalifah dalam pandangan siyasah wajib melindungi dan menjaga kemaslahatan Negara dan warganya, sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturriyah.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk Presiden RI agar senantiasa selalu mempertimbangkan dalam mengeluarkan abolisi meski mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu dari DPR, dan hak tersebut dikeluarkan terhadap kasus-kasus yang mengancam pertahanan suatu negara.
2. Pemberian abolisi terhadap kasus yang terjadi dan mengancam suatu negara diberikan tidak pernah pandang bulu yang artinya kasus besar maupun kecil jika mengancam keutuhan suatu negara maka dikeluarkan hak abolisi tersebut.
3. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengeluarkan pertimbangan hendaklah diteliti kembali agar presiden tidak salah atau sia-sia dalam mengeluarkan hak abolisi.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan (et.al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006).

Ahmad Hanafi, *Asas-Asa Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal.260.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (bandung, Citra Aditia Bakti, 2004)

Abu Bakar Aceh, Prof, Dr, *Toleransi Nabi Muahmmad dan para sahabatnya*, Cet ke-14, (solo: Romdaloni, 2000)

Abu A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung:Mizan, 1993), Cet. IV.

Abu „Isa Muhammad bin „Isa at-Tirmizdi, *Sunan At-Tirmizdi*, (Beirut: Dar al-Fikr,2005), hal. 436. Lihat juga Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin „Ali al-Baihaqi, *As-Sunan Al-*

Jurnal Al Adalah 11 (2), 205-222, *Metode Penetapan Hukum Islam menurut Al-Syathibi*, D Duski

Ade Shitu-Agbetola, “*Theori of al- Khilafah in The Religion-Political Viev of Sayyidkutb*, dalam *Hamdar Islamicus: Quartely journal of Studies and Researchin Islam*, Summer, 1991, h. 25.

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanun Al-Wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: P.T. Kharisma Ilmu, tt).

A. Musthofa Hadna, *Mengkaji Siyasah Syar'iyah*, Erlangga, Pemalang, 2011, halm 8

Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah,t.th.),

Bachsan Mustofa, *sistem hukum indonesia, cet I* (Bandung: Remaja karya, 1984)

Backy Krisnayuda, *Panca sila dan Undang-undang*, Cet I (jakarta: PT. Fajar Interoratama Mandiri, 2016)

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hal. 33.

Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Predanamedia Group, 2014)

Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta, Raja Wali Pers, 1993).

Drs. Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet V (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya 2007)

Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz V- VI*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2004), Cet. IV,

Hizbut Tahrir, *Ajhzah Dawlah al-Khilâfah fi al-Hukm wa al-Idârah* (Beirut: Darul Ummah, 2005), Cet. 1,

Muhammad Jalal Syaraf Ali Abd al-Mu`thi Muhammad, *Al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam*, (Iskandariyah: Daar al-Jami`at al-Mishriyat, 1978)

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2, Cet. I,

*Kubra*, (India: Majlis Dairah al-Ma`arif, 1344 H), Juz. 8, Cet. I.

Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, (Beirut: Dar AL-Fikr, 2004), Juz. 1,.

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islam; Al-Jarimah*, (Beirut: Dar al-Fikr al -,Arabi, 1998).

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islam; Al-Jarimah*.

Taqiuddin an-Nabhani, *Pemerintahan dalam Islam*, (Jakarta: HTI Prees, 2002) Cet.2,

Artikel ini diakses pada tanggal 20 september 2018 pada <http://www.google.co.id/amp/s/guruppkn.com/pengertian-abolisi/amp>

Artikel ini diakses pada tanggal 20 september 2018 pada [http://www.google.co.id/amp/s/guruppkn.com/Lahirnya\\_abolisi/amp](http://www.google.co.id/amp/s/guruppkn.com/Lahirnya_abolisi/amp)

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia YLBHI. 2010. *“Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945; Amandemen I, II, III, IV

Artikel ini diakses pada tanggal 20 september 2018 pada  
<http://www.google.co.id/amp/s/berita-negeri.com/amp>

Undang-undang No. 22 Tahun 2000

Artikel ini diakses pada tanggal 20 september 2018 pada  
[http://www.google.co.id/amp/s/berita-negeri,  
abolisidiindonesia.com/amp](http://www.google.co.id/amp/s/berita-negeri,abolisidiindonesia.com/amp) tujuan

Artikel ini di akses pada tanggal 22 september 2018 [http://  
www.google.co.id/amp/s/guruppkn.com/contoh-abolisi/amp](http://www.google.co.id/amp/s/guruppkn.com/contoh-abolisi/amp)

